



DINAMIKA PERSAINGAN GEOPOLITIK DI LAUT CINA SELATAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA TERHADAP ASEAN

Arvian Ijlal Adhipratama

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

Alamat: Jl. Airlangga No.4 - 6, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60115

Korespondensi penulis: arvian.ijlal.adhipratama-2024@fisip.unair.ac.id

Abstract. *The geopolitical rivalry in the South China Sea (SCS) has emerged as a pivotal concern in international relations, characterized by divergent interests between China and ASEAN nations. This area is strategically important to the world, which makes it hard for ASEAN countries to deal with China's large territorial claims. China wants to improve its position at sea by being more aggressive in its foreign policy. ASEAN countries, on the other hand, are using different strategies, from soft balancing to hard balancing. This study investigates the influence of China's foreign policy on ASEAN responses, highlighting the interplay of economics, security, and diplomacy. The study employs a qualitative methodology by synthesizing neorealism and neoliberalism perspectives, elucidating economic interdependence and the diplomatic framework essential for mitigating regional tensions.*

Keywords: *Geopolitics, South China Sea, China's Foreign Policy, ASEAN*

Abstrak. Persaingan geopolitik di Laut Cina Selatan (LCS) telah menjadi isu utama dalam hubungan internasional, yang melibatkan konflik kepentingan antara China dan negara-negara ASEAN. Kawasan ini yang memiliki kepentingan strategis global telah menciptakan dilema bagi negara-negara ASEAN yang menghadapi klaim teritorial China yang meluas. Melalui kebijakan luar negeri yang asertif, China berusaha memperkuat posisi maritimnya, sementara negara-negara ASEAN berupaya merespons melalui strategi yang bervariasi, mulai dari soft balancing hingga hard balancing. Studi ini mengkaji dampak kebijakan luar negeri China terhadap respons ASEAN dengan menyoroti dinamika ekonomi, keamanan, dan diplomasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengintegrasikan perspektif neorealisme dan neoliberalisme yang menawarkan wawasan tentang interdependensi ekonomi dan kerangka kerja diplomatik yang memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan regional.

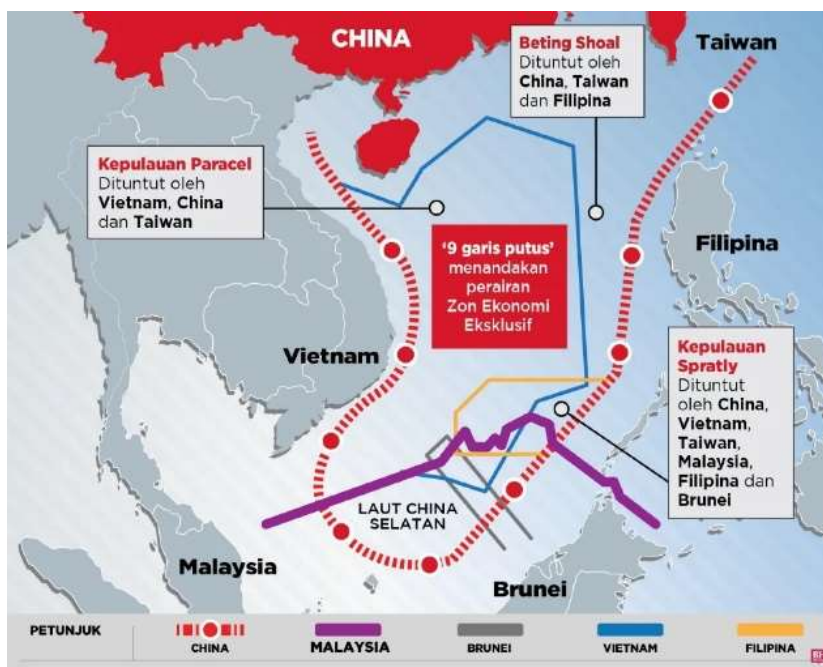
Kata Kunci: *Geopolitik, Laut Cina Selatan, Kebijakan Luar Negeri China, ASEAN*

PENDAHULUAN

Persaingan geopolitik di Laut Cina Selatan (LCS) telah menjadi isu paling kompleks dan strategis dalam dinamika hubungan internasional kontemporer. Kawasan maritim yang meliputi area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi ini merupakan episentrum konflik kepentingan antara kekuatan besar regional dengan negara-negara Asia Tenggara, di mana kebijakan luar negeri ekspansif China berbenturan langsung dengan kedaulatan maritim negara-negara ASEAN (Azari *et al.*, 2023; Benyamin & Almubaroq, 2022). Kompleksitas sengketa ini tidak hanya terbatas pada dimensi teritorial, tetapi meluas pada aspek ekonomi, keamanan, dan hukum internasional yang fundamental bagi stabilitas regional.

LCS sebagai jalur vital perdagangan global menjadikan kawasan ini memiliki signifikansi yang melampaui batas-batas regional (Emmer & Gommans, 2020; Zhong & White, 2017). Sebagai penghubung utama antara Samudera Pasifik dan Hindia, kawasan ini merupakan jalur kritis perdagangan maritim dunia (Denamiel & Brown, 2024; Schrag, 2021). Posisi strategis ini menjadikan LCS sebagai titik vital ekonomi global, di mana gangguan terhadap kebebasan navigasi dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap rantai pasok internasional dan stabilitas ekonomi dunia. China sendiri memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap jalur maritim

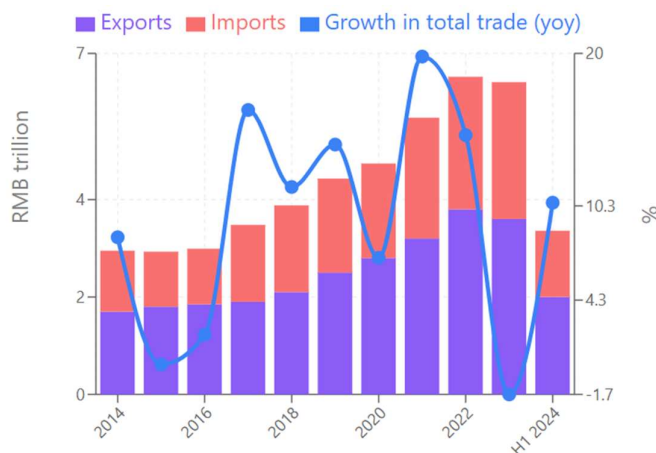
ini. Pada 2016, 64% dari total perdagangan luar negerinya melewati perairan LCS (Schrag, 2021). Ketergantungan ekonomi yang masif inilah yang kemudian menjadi salah satu driving force bagi intensifikasi klaim dan kehadiran China di kawasan tersebut.



Gambar 1. Peta Sengketa Laut China Selatan
(Sumber: Benuanta, 2023)

Sejak 2010, China telah secara sistematis meningkatkan kehadiran militer dan sipil di LCS melalui strategi yang komprehensif dan bertahap. Pembangunan pulau-pulau buatan di kepulauan Spratly dan Parcel sejak 2013 menandai eskalasi baru dalam militerisasi kawasan, di mana China tidak hanya melakukan reklamasi lahan, tetapi juga membangun infrastruktur militer termasuk landasan pacu, fasilitas radar, dan instalasi pertahanan (George & George, 2021; Bach, 2016). Strategi facts on the ground ini mencerminkan pendekatan Beijing yang berusaha mengubah status quo melalui kehadiran fisik permanent yang kemudian dijustifikasi sebagai pelaksanaan kedaulatan historis (Gambar 1, Paul et al., 2021).

Intensifikasi kehadiran China di LCS menghadirkan dilema strategis yang sangat kompleks bagi negara-negara ASEAN, mengingat posisi China yang paradoks sebagai mitra ekonomi terbesar sekaligus rival strategis maritim. Lima negara ASEAN yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia menghadapi tumpang tindih klaim maritim langsung dengan Nine Dash Line China yang mengklaim sekitar 2,1 juta kilometer persegi atau hampir 90% dari total area LCS (Djaria & Seniwati, 2024; Azari et al., 2023). Klaim ekstensif ini secara fundamental bertentangan dengan rezim hukum laut internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982, sebagaimana ditegaskan melalui putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang memenangkan Filipina dan menolak dasar hukum klaim historis China. Namun demikian, interdependensi ekonomi yang mendalam antara China dan ASEAN menciptakan kompleksitas dalam respons diplomatik regional. Hal ini dibuktikan dengan nilai perdagangan bilateral China–ASEAN telah mencapai US\$ 468.8 miliar pada 2023, menjadikan China sebagai mitra dagang terbesar ASEAN dengan pangsa 15,9% dari total perdagangan luar negeri kawasan (Huld, 2025; Gambar 2).



Gambar 2. Volume Perdagangan China – ASEAN
(Sumber: Divisualisasikan ulang oleh Peneliti dari Huld, 2025)

Paradoks ekonomi–keamanan ini semakin diperumit oleh dinamika pertumbuhan ekonomi ASEAN yang pesat. Dikutip dari ASEAN Secretariat (2024), kawasan ASEAN dengan GDP gabungan mencapai US\$ 3,8 triliun pada 2023 diproyeksikan akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2030. Momentum pertumbuhan ekonomi ASEAN sebesar 4,1% pada 2023 menciptakan leverage ekonomi yang signifikan, tetapi sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap disrupsi ekonomi akibat ketegangan geopolitik di LCS. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri China yang semakin asertif di domain maritim tidak hanya mengancam kedaulatan individual negara-negara ASEAN, tetapi juga berpotensi mengganggu arsitektur keamanan regional yang telah terbangun selama beberapa dekade. Ketidakseimbangan antara kapasitas ekonomi dan militer China yang terus menguat dengan kemampuan defensif negara-negara ASEAN menciptakan asimetris kekuatan yang fundamental, memaksa kawasan untuk mengembangkan strategi hedging yang sophisticated dalam menghadapi hegemoni maritim China.

Kompleksitas sengketa LCS semakin diperumit oleh dimensi multilateral yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar eksternal, khususnya Amerika Serikat (AS) yang memiliki kepentingan strategis dalam mempertahankan “freedom of navigation” dan “balance of power” regional. Kebijakan “pivot to Asia” Amerika Serikat dan komitmennya terhadap sekutu regional menciptakan dinamika triangular yang kompleks, di mana negara-negara ASEAN harus menavigasi tekanan geopolitik dari dua kekuatan besar yang bersaing. Misalnya, respons kolektif ASEAN melalui mekanisme diplomatik seperti Declaration on the Conduct of Parties (DOC) dan negosiasi Code of Conduct (COC) dengan China mencerminkan upaya regional untuk mengelola eskalasi konflik sambil mempertahankan kepentingan ekonomi yang vital (Fitria, 2023; Banlaoi, 2021). Namun demikian, efektivitas pendekatan diplomatik ini terkendala oleh prinsip non-interference ASEAN dan heterogenitas kepentingan nasional anggotanya, yang sering kali membatasi kemampuan kawasan untuk mengambil posisi yang tegas dan unified terhadap ekspansionisme maritim China.

KAJIAN TEORI

Intensifikasi persaingan geopolitik di LCS telah membawa perubahan signifikan terhadap lanskap keamanan Asia Tenggara kontemporer, kebijakan luar negeri China yang semakin asertif

menciptakan dilema strategis yang kompleks bagi negara-negara ASEAN, terutama negara yang bersengketa. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai hubungan kausal antara tindakan unilateral China dan respons kebijakan negara-negara ASEAN.

Pertama, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan luar negeri China memengaruhi respons negara-negara ASEAN dengan memperhatikan mekanisme kausal antara sikap asertif China dan reaksi kebijakan ASEAN. Tiga domain kebijakan yang teridentifikasi, yaitu ekonomi, keamanan, dan diplomasi. Hal ini menunjukkan bahwa China menerapkan pendekatan dua arah, yang melibatkan peningkatan kehadiran militer sekaligus menjaga citra sebagai mitra kooperatif. Kedua, perlu dikaji sejauh mana persaingan geopolitik ini memengaruhi stabilitas regional. Hal ini menuntut adanya definisi operasional terhadap indikator stabilitas kawasan dan pemetaan pola eskalasi dan de-eskalasi konflik. Perilaku asertif China telah menciptakan dilema keamanan regional yang berpotensi mengancam kestabilan kawasan secara keseluruhan.

Studi ini memiliki dua objektif spesifik yang saling terkait dalam menganalisis kompleksitas hubungan China-ASEAN. Pertama, menganalisis dampak kebijakan China dengan mengukur perubahan kebijakan negara-negara ASEAN periode 2010-2025 sebagai respons terhadap assertiveness China. Periode ini dipilih karena menandai eskalasi signifikan dalam tindakan China di Laut Cina Selatan, termasuk pembangunan artificial islands dan militarisasi features yang dipersengketakan. Kedua, mengevaluasi efektivitas respons ASEAN melalui penilaian kolektif versus respons individual dalam mengelola ketegangan dengan China. ASEAN telah menunjukkan keterbatasan dalam mencapai unified response, dengan beberapa negara anggota seperti Kamboja dan Laos cenderung mendukung posisi China.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analisis longitudinal dengan mensintesis teori yang mengintegrasikan perspektif neorealisme dan neoliberalisme untuk memahami kompleksitas hubungan China-ASEAN. Neorealism menekankan bahwa struktur sistem internasional yang anarki mendorong negara untuk mengutamakan membantu dirinya sendiri dan balance of power (Waltz, 2000). Dalam hal kebangkitan China, teori ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan kekuatan China menciptakan security dilemma yang memaksa ASEAN melakukan penyeimbangan internal dan eksternal.

Di sisi lain, neoliberalisme menekankan complex interdependence dan cooperation benefits melalui institutional solutions (Pinson & Journal, 2016; Jervis, 1999). Aplikasi teori ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi yang kuat antara China dan ASEAN dapat membatasi eskalasi konflik, sementara institusi ASEAN memfasilitasi dialog dan keamanan koperasi. Namun, institutional constraints dalam ASEAN Way, termasuk prinsip konsensus dan non-interference, seringkali menghambat pembentukan respons kolektif yang efektif. Kedua perspektif teoretis ini memberikan kerangka analisis yang komplementer untuk memahami bagaimana negara-negara ASEAN menerapkan hedging strategies dalam menghadapi kebangkitan China. Perspektif ini mengintegrasikan unsur keseimbangan dan bandwagoning sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara.

Triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas dan keterandalan hasil yang diperoleh. Proses triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode, dan teori untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap kompleksitas hubungan China-ASEAN. Pendekatan ini bertujuan untuk memverifikasi hasil studi dengan membandingkan data yang diperoleh dari studi dokumen dan kebijakan. Penggunaan triangulasi teoritis juga dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif neorealisme dan

neoliberalisme yang memberikan dimensi yang saling melengkapi dalam analisis hubungan internasional antara China dan ASEAN. Teori neorealisme membantu menjelaskan bagaimana struktur sistem internasional yang anarkis mendorong negara-negara untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri dan keseimbangan kekuatan, sementara neoliberalisme memberikan gambaran tentang pentingnya interdependensi kompleks dan manfaat kerjasama melalui solusi institusional. Penggabungan kedua teori ini memungkinkan peneliti untuk memahami kedalaman dan dinamika hubungan antara China dan ASEAN dalam konteks yang lebih luas.

Validitas data dalam studi ini juga diperoleh melalui penggunaan teknik triangulasi metode, yang memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi hasil yang diperoleh dari berbagai sumber dan perspektif. Validitas internal studi diperkuat dengan memastikan bahwa instrumen pengumpulan data telah diuji dan diadaptasi untuk menghindari bias yang mungkin muncul. Di sisi lain, validitas eksternal diperhatikan dengan mengevaluasi apakah hasil studi ini dapat diterapkan atau relevan dengan konteks yang lebih luas, termasuk negara-negara ASEAN lainnya yang tidak terlibat langsung dalam studi ini. Dengan demikian, triangulasi dan validitas data yang ketat memberikan dasar yang kuat bagi kesimpulan yang diambil dan memberikan keyakinan bahwa hasil studi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hubungan internasional, khususnya dalam konteks kebangkitan China dan respons negara-negara ASEAN.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

LCS telah menjadi salah satu arena persaingan geopolitik yang sangat kompleks dan signifikan dalam tatanan internasional kontemporer, di mana dinamika kebijakan luar negeri China menciptakan implikasi transformatif terhadap stabilitas regional dan hubungan bilateral dengan negara-negara ASEAN (Kovtun & Vartovnyk, 2023; Sviatko, 2020). Kompleksitas sengketa maritim di kawasan ini tidak hanya melibatkan pertarungan teritorial tradisional. Namun, hal ini juga mencerminkan pergeseran fundamental dalam arsitektur keamanan Asia-Pasifik yang didorong oleh ambisi geopolitik China untuk memproyeksikan kekuatan maritimnya melalui konsep *core interests* yang diproklamlirkan pada tahun 2003 dan kemudian ditegaskan secara formal pada 2009 (Tabel 1; Holmes & Yoshihara, 2011).

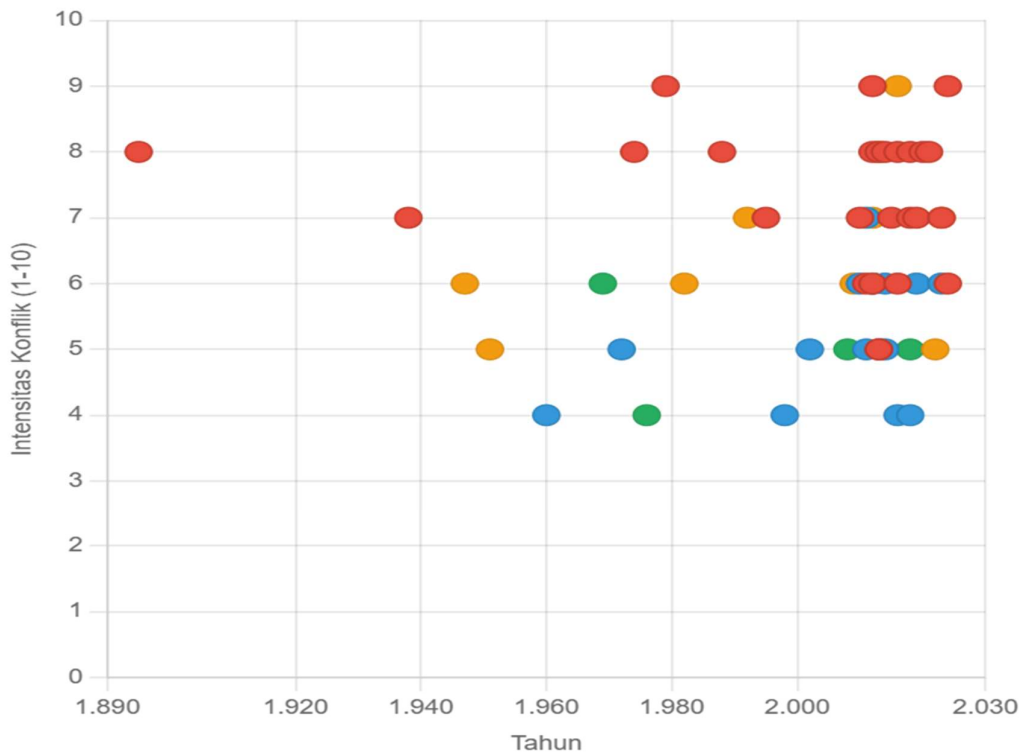
Tabel 1. Perjalanan *Core Interest* China sejak awal proklamasi hingga era kontemporer

Aspek	Ringkasan
Proklamasi Awal (2003)	Istilah <i>core interests</i> diperkenalkan untuk pertama kali dalam konteks Taiwan sebagai isu yang tidak dapat dinegosiasikan.
Perluasan (2006)	Penambahan Tibet dan Xinjiang sebagai kepentingan inti untuk menjaga integritas teritorial dan stabilitas domestik.
Penegasan Formal (2009)	Dai Bingguo menetapkan tiga pilar: keamanan politik, kedaulatan-teritorial, dan pembangunan ekonomi-sosial berkelanjutan.
Inklusi LCS (2012–sekarang)	Sejak akhir kepemimpinan Hu Jintao hingga era Xi Jinping, LCS ditetapkan sebagai kepentingan inti, paralel dengan isu lain.
Klaim “Nine-Dash Line”	Klaim 90% LCS melalui garis sembilan putus, mendasari kesiapan militer untuk mempertahankan klaim tersebut.

Alasan Ekonomi	LCS jalur ~1/3 perdagangan global; cadangan migas besar vital bagi ketahanan energi China.
Alasan Keamanan	Zona penyangga strategis dan akses SSBN ke Pasifik barat untuk deterrence nuklir, menegaskan nilai pertahanan LCS.
Implikasi bagi ASEAN	Risiko menabrak “red lines” mendorong kehati-hatian kebijakan; potensi sanksi ekonomi dan tekanan politik.
Dampak Stabilitas Regional	Reklamasi pulau dan instalasi militer memperburuk ketidakpastian keamanan, memicu dinamika eskalasi konflik.
Tantangan Diplomasi ASEAN	Prinsip non-interference dan keputusan konsensus menghambat respons kolektif, menciptakan dilemma persatuan vs. Kepentingan.

(Sumber: Olah Data oleh Peneliti)

Transformasi kebijakan luar negeri China di LCS mencerminkan pergeseran dari pendekatan diplomatik yang lebih restriktif menuju strategi asertif yang sistematis. Beijing secara progresif mengkonsolidasikan klaim teritorialnya dengan menggabungkan instrumen hukum, militer, ekonomi, dan administratif secara cermat selama perjalanannya. Oleh karena itu, Peneliti membagi perkembangan ini menjadi empat fase analitis yang mencerminkan karakteristik persaingan geopolitik kontemporer antara China dan ASEAN di kawasan tersebut. Fase-fase ini menggambarkan dinamika yang terus berkembang dalam hubungan antara kedua pihak di LCS.



Gambar 3. Garis Waktu Peristiwa Utama Sengketa Laut Cina Selatan
(Sumber: Olah Data dan Sintesis Data oleh Peneliti)

Fase 1 (2010-2012): Inisiasi Asertif

Periode 2010-2012 menandai pergeseran strategis dalam kebijakan luar negeri China di Laut China Selatan (LCS) yang ditandai dengan deklarasi status core interests pada tahun 2009 (Ott, 2020). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Beijing mulai memosisikan klaim teritorialnya di LCS setara dengan isu-isu sensitif seperti Taiwan dan Tibet dalam agenda nasionalnya secara tidak langsung (Wong, 2011; Holmes & Yoshihara, 2011). Meskipun kemudian tampak mundur dari pernyataan tersebut pada 2011, tetapi langkah ini telah menetapkan dasar bagi pendekatan yang lebih asertif di kawasan tersebut. Secara paralel, Peneliti menemukan bahwa China meningkatkan patroli maritimnya dan memperkuat kontrol administratif melalui pembentukan Kota Sansha di Pulau Woody sebagai unit administratif tingkat prefektur yang mengawasi sekitar dua juta kilometer persegi perairan yang dipersengketakan (Heydarian, 2020). Langkah administratif ini menjadi instrumen penting dalam strategi China untuk memperluas klaim teritorialnya secara de facto (Xu, 2024).

Puncak dari fase ini adalah konfrontasi Scarborough Shoal antara China dan Filipina pada April-Juni 2012. Insiden bermula ketika kapal angkatan laut Filipina mencoba menangkap delapan kapal nelayan China yang berlabuh di perairan karang tersebut, namun dihalangi oleh kapal pengawas maritim China (Green, 2017; De Castro, 2015). Konfrontasi ini menjadi bukti konsep bagi strategi kontrol teritorial China, yang berujung pada penguasaan efektif atas atol tersebut oleh Beijing (Sari & Yustitiantingtyas, 2019). Insiden ini juga menjadi katalisator bagi Filipina untuk memulai kasus arbitrase internasional terhadap China pada Januari 2013. Periode ini menunjukkan bahwa China mulai mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dalam menegaskan klaimnya di LCS, menggunakan kombinasi instrumen diplomatik, administratif, dan kehadiran fisik di lapangan (Lee, 2025; Fangyin, 2016).

Tabel 2. Peristiwa konfrontasi antara China dan Filipina

Tanggal	Kejadian	Dampak
8 April 2012	Pesawatintai Filipina mendeteksi 8 kapal ikan China di atol	Memicu respons Filipina untuk mengerahkan kapal patroli
10 April 2012	BRP Gregorio del Pilar tiba dan memeriksa muatan kapal ikan	Ditemukan koral, kerang raksasa, hiu; upaya penahanan digagalkan oleh kapal CMS China
10–23 April 2012	Kebuntuan: Filipina menempatkan kapal di mulut laguna Shoal	Terjadi saling blokade dan kebuntuan operasional
23 April 2012	China menyatakan menarik dua kapal sebagai sinyal dialog	Filipina tetap menempatkan kapal, menimbulkan kebingungan tentang penarikan sepihak
28 April 2012	Kapal China melecehkan kapal Filipina di perairan Shoal	Menegaskan kontrol China dan mengganggu patroli Filipina
Juni 2012	Musim topan memaksa penarikan kapal sipil kedua pihak	China pasang penghalang rantai di mulut laguna; kontrol de facto tercipta
Jan 2013	Filipina ajukan arbitrase UNCLOS terhadap China	Menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa lebih lanjut

Fase 2 (2013-2016): Masifikasi Ekspansi



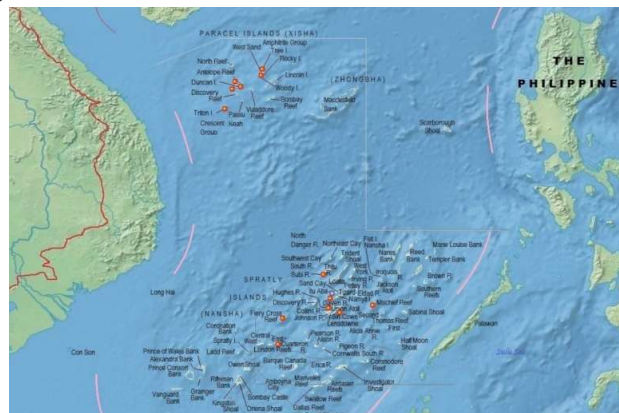
Gambar 4. Pulau Reklamasi China dan Konstruksinya

(Sumber: U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2016)

Fase kedua ditandai dengan ekspansi masif melalui reklamasi lahan berskala besar yang dimulai pada Desember 2013 hingga Oktober 2015. China membangun pulau-pulau buatan dengan total area mendekati 3.000 acre di tujuh terumbu karang yang didudukinya di Kepulauan Spratly (Dolven et al., 2015). Proyek reklamasi ini, dijuluki "Great Wall of Sand" oleh AS, mengubah secara dramatis fitur maritim yang sebelumnya terendam menjadi pulau-pulau buatan yang dapat mendukung infrastruktur militer. Meskipun reklamasi lahan dan pembangunan pulau buatan bukan praktik yang unik bagi China, tetapi skala dan kecepatan aktivitas China, keanekaragaman hayati area tersebut, dan signifikansi Kepulauan Spratly bagi ekologi kawasan menjadikan tindakan China sebagai perhatian khusus (U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2016).

Pada pulau-pulau buatan ini, China mengembangkan infrastruktur militer yang substansial, termasuk landasan pacu, sistem radar, dan fasilitas rudal (Song, 2015). Pembangunan ini secara efektif mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan dan memperkuat posisi China dalam sengketa teritorial. Bersamaan dengan ekspansi fisik, China juga menolak proses arbitrase internasional yang diinisiasi Filipina. Ketika Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag mengeluarkan putusan pada Juli 2016 yang menolak klaim China atas "nine-dash line" dan menyatakan bahwa aktivitas reklamasi China melanggar ketentuan lingkungan dalam UNCLOS, Beijing dengan tegas menolak yurisdiksi pengadilan dan mengabaikan putusan tersebut. Penolakan ini menunjukkan pendekatan China yang semakin mengandalkan kekuatan dan pengaruhnya daripada mekanisme hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa.

Fase 3 (2017-2020): Konsolidasi dan Normalisasi



Gambar 5. Peta dari Laut Cina Selatan yang diklaim China melalui Kepulauan Xisha dan Nansha
(Sumber: Heydarian, 2020)

Periode 2017-2020 ditandai dengan fokus pada institusionalisasi kontrol melalui langkah-langkah administratif. China memperkuat kehadirannya di kawasan dengan mengkonsolidasikan pencapaian teritorialnya dan menormalkan klaim-klaimnya. Peneliti menemukan bahwa pandemi COVID-19 pada 2020 memberikan peluang bagi China untuk melakukan ekspansi diam-diam di LCS. Pada April 2020, China mendirikan dua distrik administratif baru di LCS, satu untuk Kepulauan Parcel dan Macclesfield Bank dan satu lagi untuk Kepulauan Spratly, keduanya berada di bawah yurisdiksi Kota Sansha (Heydarian, 2020). Pembentukan distrik administratif ini memicu protes dari Vietnam dan Filipina.

Peneliti melihat bahwa China juga memanfaatkan insentif ekonomi untuk mendapatkan penerimaan atas klaimnya, terutama melalui proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI) dan ekspansi perdagangan dengan negara-negara ASEAN. BRI menjadi instrumen penting bagi China untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN dan secara tidak langsung meredakan ketegangan politik yang muncul setelah sengketa LCS memanas pada 2010. Negara-negara ASEAN memandang BRI sebagai sarana untuk meningkatkan konektivitas dan mengatasi kebutuhan pembangunan infrastruktur mereka, dengan Bank Pembangunan Asia memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur di ASEAN dari 2016 hingga 2030 akan mencapai US\$ 2,8-3,1 triliun (Bank, 2023; Park, 2022).

Fase 4 (2021-2025): Kompetisi yang Diatur

Fase keempat ditandai dengan implementasi Undang-Undang Penjaga Pantai China 2024 yang memperbarui Undang-Undang Penjaga Pantai 2021 untuk memberikan dasar hukum bagi penegakan klaim maritim China (Tabel 3; Laroia, 2024). Peraturan baru ini, yang mulai berlaku pada Juni 2024, memungkinkan penangkapan orang yang dicurigai melakukan pelanggaran masuk ilegal hingga perpanjangan 60 hari tanpa pengadilan dan penangkapan kapal asing yang memasuki perairan teritorial China secara ilegal. Peraturan ini memperburuk ketegangan di perairan yang dipersengketakan dan menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih dengan China (Yeung & Yeung, 2024).

Tabel 3. Prosedur Penahanan oleh China

Tahap	Waktu dan Persyaratan
Keputusan Penahanan	Ditetapkan oleh kepala lembaga Penjaga Pantai setempat dalam waktu 24 jam setelah interogasi awal.
Periode Awal	Maksimum 30 hari , tercatat sejak surat keputusan penahanan dibuat.
Perpanjangan “Kasus Rumit”	Diperlukan persetujuan lembaga Penjaga Pantai di tingkat provinsi atau lebih tinggi untuk menambah hingga 60 hari.
Identitas Tidak Jelas	Periode dihitung sejak tanggal identitas narapidana dikonfirmasi.

China juga semakin mengandalkan operasi pelecehan rutin terhadap kapal nelayan dan kapal militer negara lain di LCS. Pada Januari 2025, kapal penjaga pantai China dan helikopter angkatan laut China dilaporkan berkonfrontasi dengan sekelompok kapal perikanan Filipina yang melakukan survei ilmiah di area yang dipersengketakan, memaksa mereka membatalkan operasi tersebut (Gomez & Associated Press, 2025). Peneliti melihat bahwa insiden ini menunjukkan pola yang konsisten dalam taktik China untuk menegaskan kontrolnya atas perairan yang dipersengketakan.

Meskipun ketegangan terus berlanjut, peneliti menemukan bahwa integrasi ekonomi antara China dan ASEAN tetap kuat dan terus bertumbuh. Hal ini dibuktikan oleh National Development and Reform Commission (NDRC), People's Republic of China (2021), China telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 12 tahun berturut-turut, sementara ASEAN menjadi mitra dagang terbesar China pada tahun lalu. Sekitar 90% barang yang diperdagangkan antara kedua pihak menikmati perlakuan bebas tarif, dan hubungan bilateral yang semakin erat secara signifikan mendorong aliran bebas faktor produksi dan investasi di kawasan. Pada saat yang sama, Malaysia sebagai ketua Komite Tetap ASEAN tahun 2025, bersama dengan China, memimpin kelompok kerja gabungan untuk mempercepat negosiasi Kode Etik di LCS yang ditargetkan selesai pada 2026 (Talosig-Bartolome, 2025). Negosiasi ini telah berlangsung selama 23 tahun dan masih menghadapi isu-isu penting seperti cakupan geografis LCS, sifat hukum kode etik, dan definisi konsep-konsep dalam draf seperti kata "pengendalian diri".

Analisis Teoritis Kasus Sengketa Laut Cina Selatan

Peneliti melihat bahwa persaingan geopolitik di LCS mencerminkan ketegangan struktural yang menegaskan peningkatan kehadiran militer dan diplomatik China sekaligus menimbulkan tekanan strategis terhadap negara-negara ASEAN. Peneliti menemukan bahwa setelah deklarasi "core interests" pada 2009 dan eskalasi reklamasi pulau buatan sejak 2013, Beijing menunjukkan pola asertivitas yang berkelanjutan untuk memperkuat klaim historisnya sehingga memaksa negara-negara ASEAN mengadopsi respons kebijakan berlapis antara mitra ekonomi besar dan rival maritim. Dengan nilai perdagangan bilateral mencapai hampir US\$ 469 miliar pada 2023, relasi ekonomi yang intensif berperan sebagai penyangga utama meskipun sengketa teritorial terus memanas.

Analisis Neorealisme

Melalui neorealisme, kebangkitan kekuatan China memicu dilema keamanan klasik bagi negara-negara regional seiring meningkatnya ketidakpastian terhadap niat Beijing. Sebagai respons, negara-negara ASEAN secara konsisten mengembangkan pola *soft balancing*, seperti peningkatan patroli bersama dan kerja sama intelijen, tanpa melakukan konfrontasi militer langsung untuk menghindari eskalasi terbuka dengan China. Peneliti melihat bahwa pilihan antara merapat ke aliansi eksternal ataupun *bandwagoning* bergantung pada penilaian ancaman masing-masing negara.

Misalnya, Filipina dan Vietnam menunjukkan kecenderungan *balance-of-threat* dengan memperdalam kerja sama keamanan maritim bersama AS, sedangkan Kamboja dan Laos cenderung netral atau lebih *bandwagoning* menyusul ketergantungan ekonomi pada Beijing. Peningkatan anggaran pertahanan di Malaysia dan Indonesia sejak 2015 juga dapat dipahami sebagai respons rasional terhadap perubahan distribusi kekuatan regional, di mana modernisasi armada laut menjadi langkah untuk memperkuat *deterrence posture* terhadap eskalasi di perairan yang dipersengketakan (Sulong *et al.*, 2024; Tian *et al.*, 2024). Dengan demikian, dinamika peningkatan militer ASEAN menegaskan bahwa struktur anarkis sistem internasional memaksa negara-negara ring satu China untuk memprioritaskan demi menjaga keseimbangan kekuatan.

Analisis Neoliberalisme

Sebaliknya, kerangka neoliberalisme menyoroti interdependensi ekonomi sebagai mekanisme penting yang membatasi eskalasi konflik, sekalipun sengketa teritorial masih terus berlangsung. Peneliti melihat upaya China-ASEAN Trade in Goods Agreement yang menghilangkan tarif bagi sekitar 90% komoditas bilateral telah menciptakan insentif kuat bagi

stabilitas maritim, karena gangguan di LCS berpotensi merusak rantai pasok global yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Institusi ASEAN, khususnya forum Dialogue Partners dan ASEAN Regional Forum, telah memainkan peran sentral dalam menyediakan mekanisme manajemen konflik yang terstruktur sehingga memungkinkan mediasi dan dialog berulang untuk menurunkan biaya transaksi dalam penyelesaian sengketa. Prinsip keuntungan absolut juga tercermin melalui perjanjian kerja sama ekonomi multilateral, di mana negara-negara ASEAN menilai manfaat ekonomi jangka panjang lebih tinggi dibandingkan kekhawatiran atas pergeseran kekuasaan relatif dengan China. Melalui pendekatan *bottom-up*, peneliti menemukan bahwa ASEAN memanfaatkan interaksi yang berulang untuk membangun kepercayaan terbatas, meski pendekatan konsensus dan *non-interference* terkadang menghambat respons kolektif yang lebih tajam.

KESIMPULAN

Studi ini mengungkapkan bahwa respons negara-negara ASEAN terhadap asertivitas China di LCS bersifat multifaset dan dinamis. Tiga strategi utama yang diidentifikasi mencakup: 1) soft balancing melalui penguatan infrastruktur keamanan maritim dan modernisasi penjaga pantai yang sejalan dengan prediksi neorealisme; 2) ketergantungan ekonomi yang mendalam antara ASEAN dan China sehingga membatasi potensi eskalasi militer dan menjaga sengketa tetap terkendali pada tingkat intensitas rendah, sesuai dengan perspektif neoliberalisme; dan 3) heterogenitas strategi antarnegara ASEAN, seperti Vietnam yang cenderung menggunakan hard balancing dan Thailand yang mengedepankan hedging ekonomi, mencerminkan perbedaan dalam persepsi ancaman dan biaya peluang integrasi ekonomi. Negosiasi Code of Conduct yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, meskipun menunjukkan keterbatasan institusional ASEAN, menekankan pentingnya diplomasi kolektif dalam meredakan potensi konflik terbuka.

Temuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya tekanan militer, tetapi juga insentif ekonomi yang ada saling memengaruhi dalam membentuk kebijakan luar negeri ASEAN. Keefektifan respons kawasan sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan, mulai dari peningkatan kapabilitas pertahanan hingga perjanjian ekonomi. Misalnya, dalam merancang strategi hedging yang adaptif dan koheren di bawah tekanan geopolitik China. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan relevansi gabungan antara neorealisme dan neoliberalisme dalam menjelaskan dinamika persaingan di LCS dan memperlihatkan bahwa interdependensi ekonomi serta struktur institusional berbasis konsensus menjadi penopang utama stabilitas regional meskipun dihadapkan pada hegemoni maritim China.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat (2024) ASEAN ANNUAL REPORT 2023 (JUNE – DECEMBER), ASEAN MATTERS: EPICENTRUM OF GROWTH. Edited by M. Hernandez, D. Pahnuel, and C. Razukas. https://asean.org/wp-content/uploads/2024/07/FIN_ASEAN-Annual-Report-2023-June-December-Epub-1.pdf.
- Azari, M.A.N., Chandran, S.D. and Aziz, F.M.M. (2023) 'DISPUTES IN THE SOUTH CHINA SEA AND THE ROLE OF CHINA AND ASEAN IN CONFLICT RESOLUTION', *Journal of Business and Social Development*, 11(1), pp. 38–45. <https://doi.org/10.46754/jbsd.2023.03.004>.
- Bach, N.T.N. (2016) 'The building of artificial islands of China in the Spratly Islands - An analysis in the viewpoint of the international law', *Science and Technology Development Journal*, 19(2), pp. 77–90. <https://doi.org/10.32508/stdj.v19i2.731>.

- Bank, A.D. (2023) Q&A: Innovative financing can help bridge Southeast Asia’s infrastructure financing gap. <https://www.adb.org/news/features/qa-innovative-financing-help-bridge-southeast-asia-infrastructure-financing-gap>.
- Banlaoi, R.C. (2021) 'Cooperation through Track II mechanisms,' in Routledge eBooks, pp. 392–410. <https://doi.org/10.4324/9780367822217-27>.
- Benyamin, J. and Almubaroq, H.Z. (2022) 'The dynamics of the China Maritime Militia conflict in South China Sea on sovereignty Indonesian countries and ASEAN region countries,' JESS (Journal of Education on Social Science), 5(2), p. 185. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i2.385>.
- China Daily (2021) 'China-ASEAN commerce, investment to help boost global recovery amid downside pressure,' China Daily [Preprint]. https://en.ndrc.gov.cn/netcoo/goingout/202111/t20211130_1306408.html.
- De Castro, R. (2015) 'The Philippines Confronts China in the South China Sea: Power Politics vs. Liberalism-Legalism,' Asian Perspective, 39(1), pp. 71–100. <https://doi.org/10.1353/apr.2015.0010>.
- Denamiel, T. and Brown, E. (2024) 'The State of Maritime Supply-Chain Threats,' Center for Strategic & International Studies, 4 November. <https://www.csis.org/analysis/state-maritime-supply-chain-threats>.
- Djaria, N.A. and Seniwati, N.S. (2024) 'Maritime cooperation between Indonesia and China in South China Sea,' Deleted Journal, 3(1), pp. 108–128. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.501>.
- Dolven, B. et al. (2015) Chinese land reclamation in the South China Sea: implications and policy options. R44072. Congressional Research Service. <https://www.crs.gov>.
- Emmer, P.C. and Gommans, J.J.L. (2020) 'The South China Sea,' in Cambridge University Press eBooks, pp. 353–388. <https://doi.org/10.1017/9781108647403.021>.
- Fangyin, Z. (2016) 'Between assertiveness and self-restraint: understanding China’s South China Sea policy,' International Affairs, 92(4), pp. 869–890. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12657>.
- Fitria, N. (2023) 'Facing South China Sea Dispute: Where is ASEAN Single Voice?,' Journal Research of Social Science Economics and Management, 2(12), pp. 2979–2986. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i12.495>.
- George, M. and George, A.R. (2021) 'Betwixt “the Wise Man and the Prince”: A Partnership in Comity and Conciliation for the South China Sea Disputes,' Journal of East Asia and International Law, 14(2), pp. 271–296. <https://doi.org/10.14330/jeail.2021.14.2.03>.
- Gomez, J. and Associated Press (2025) Philippines accuses China’s forces of harassing fisheries vessels in the South China Sea, Washington Times, pp. 1–7. <https://www.washingtontimes.com/news/2025/jan/25/china-accused-harassing-fisheries-vessels-south-ch/>.
- Green, M. (2017) Counter-Coercion Series: Scarborough Shoal Standoff | Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/counter-co-scarborough-standoff/>.
- Heydarian, R.J. (2020) 'China lays ever larger claim to South China Sea,' Asia Times, 29 April. <https://asiatimes.com/2020/04/china-lays-ever-larger-claim-to-south-china-sea/>.

- Holmes, J.R. and Yoshihara, T. (2011) TWQ: Can China defend a 'Core Interest' in the South China Sea? - Spring 2011. <https://www.csis.org/analysis/twq-can-china-defend-core-interest-south-china-sea-spring-2011>.
- Huld, A. (2025) China-ASEAN trade and investment relations. <https://www.china-briefing.com/news/china-asean-trade-and-investment-relations/>.
- Jervis, R. (1999) 'Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the debate,' *International Security*, 24(1), pp. 42–63. <https://doi.org/10.1162/016228899560040>.
- Kovtun, O.Yu. and Vartovnyk, I.M. (2023) 'THE SOUTH CHINA SEA DISPUTE AS a THREAT TO ASEAN COOPERATIVE SECURITY IN THE ASIA-PACIFIC REGION,' *ACTUAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL RELATIONS*, (156), pp. 11–20. <https://doi.org/10.17721/apmv.2023.156.1.11-20>.
- Laroia, A. (2024) 'China coast guard regulations allowing officers to arrest foreigners for trespassing in disputed South China Sea take effect,' *JURIST - News*, 17 June. <https://www.jurist.org/news/2024/06/china-coast-guard-regulations-allowing-officers-to-arrest-foreigners-for-trespassing-in-disputed-south-china-sea-take-effect/>.
- Lee, P. (2025) 'High stakes gamble as Japan, China and the U.S. spar in the East and South China seas,' *Japan Focus*, 8(43). <https://doi.org/10.1017/s1557466010010442>.
- Ott, M. (2020) China and the South China Sea. <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/china-and-south-china-sea>.
- Park, S.C. (2022) 'The roles and strategies of ASEAN in the Belt and Road Initiative (BRI),' *Cuadernos Europeos De Deusto*, (03), pp. 115–148. <https://doi.org/10.18543/ced-03-2022pp115-148>.
- Paul, C. et al. (2021) A Guide to Extreme Competition with China, RAND Corporation eBooks. <https://doi.org/10.7249/rra1378-1>.
- Pinson, G. and Journal, C.M. (2016) 'The Neoliberal City – theory, evidence, debates,' *Territory Politics Governance*, 4(2), pp. 137–153. <https://doi.org/10.1080/21622671.2016.1166982>.
- Sari, D.K. and Yustitiningtyas, L. (2019) 'PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL TERHADAP PENETAPAN KEPEMILIKAN PULAU SCARBOROUGH SHOAL DI LAUT CINA SELATAN,' *Perspektif Hukum*, 18(2), p. 203. <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.159>.
- Schrag, J. (2021) How much trade transits the South China Sea? | ChinaPower Project. <https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/>.
- Song, Y.-H. (2015) Reclamation in the South China Sea: Legal loopholes, practical impacts | Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amt.csis.org/reclamation-in-the-south-china-sea-legal-loopholes-practical-impacts/>.
- Soong, J.-J. (2018) 'China’s One Belt and One Road Initiative meets ASEAN Economic Community: Propelling and deepening regional Economic Integration?,' *Chinese Economy*, 51(4), pp. 291–297. <https://doi.org/10.1080/10971475.2018.1457335>.
- Sulong, N.A., Shaari, N.M.S. and Rahim, N.H.A. (2024) 'REINVESTIGATING THE IMPACT OF GROSS DOMESTIC SAVINGS, EXCHANGE RATES, AND NATIONAL DEBT ON MILITARY EXPENDITURE IN MALAYSIA,' *Deleted Journal*, 12, pp. 47–54. <https://doi.org/10.58915/johdec.v12.2023.632>.

- Sviatko, M. (2020) 'ASEAN's dilemma: China and its South China Sea's stance,' *Journal of Accounting Finance Economics and Social Sciences*, 5(2), pp. 25–33. [https://doi.org/10.62458/jafess.160224.5\(2\)25-33](https://doi.org/10.62458/jafess.160224.5(2)25-33).
- Talosig-Bartolome, M. (2025) Asean, China meet on SCS code of conduct, *BusinessMirror*. <https://businessmirror.com.ph/2025/04/14/asean-china-meet-on-scs-code-of-conduct/>.
- Tian, N. et al. (2024) Trends in World Military Expenditure, 2023. <https://doi.org/10.55163/bqga2180>.
- U.S.-China Economic and Security Review Commission (2016) China's island building in the South China Sea: damage to the marine environment, implications, and international law | U.S.- CHINA | ECONOMIC and SECURITY REVIEW COMMISSION. <https://www.uscc.gov/research/chinas-island-building-south-china-sea-damage-marine-environment-implications-and>.
- Waltz, K.N. (2000) 'Structural Realism after the Cold War,' *International Security*, 25(1), pp. 5–41. <https://doi.org/10.1162/016228800560372>.
- Wong, E. (2011) China hedges over whether South China Sea is a 'Core interest' worth war. <https://web.archive.org/web/20120629123942/http://www.nytimes.com/2011/03/31/world/asia/31beijing.html>.
- Xu, B. (2024) 'China's maritime disputes,' *Council on Foreign Relations*, 22 May. <https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes>.
- Yeung, C. and Yeung, C. (2024) China's new coast guard regulations up ante in South China Sea. <https://www.asiapacific.ca/publication/chinas-new-coast-guard-regulations-in-south-china-seas>.
- Zhong, H. and White, M. (2017) 'South China Sea,' *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, 2(1), pp. 9–24. <https://doi.org/10.1163/24519391-00201003>.